

**Pola Komunikasi Pemerintah Kalurahan Baturetno,  
Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta**

**Irvan Riyadi dan Ade Chandra**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email : nurani\_adechandra@yahoo.co.id

**Abstrak**

Tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan semakin kompleks antara lain kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan digitalisasi. Untuk itu komunikasi yang baik antar lini di pemerintahan desa sebagai organisasi tidak sekedar rutinitas tanpa makna. Penelitian ini berfokus pada Pola Komunikasi Pemerintah Kalurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebanyak 5 informan selaku perangkat kalurahan sesuai bidang tugasnya. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pola komunikasi terkoordinasi antara struktur dengan prinsip keterbukaan dan berlangsung secara akrab. Komunikasi Pemerintah Kalurahan Baturetno mencerminkan pola komunikasi koordinatif timbal balik dua arah antar struktur organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal.

**Kata Kunci : Pola Komunikasi, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat**

**Abstract**

*The challenges faced by village governments in implementing development programs are increasingly complex, including the speed and quality of service to the community with digitalization. For this reason, good communication between lines in village government as an organization is not just a meaningless routine. This research focuses on Communication Patterns of the Baturetno Village Government, Banguntapan, Bantul. This research is using descriptive qualitative method. A total of 5 informants as village officials according to their field of work. Data collection through observation and interviews. The results of the research show that the pattern of communication is coordinated between structures with the principle of openness and takes place in an intimate manner. The communication of Baturetno Village Government reflects a pattern of two-way reciprocal coordinative communication between organizational structures, both vertically and horizontally.*

**Keywords: Patterns of Communication, Village Government, Community**

---

## PENDAHULUAN

Komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun dalam organisasi. Bahkan diyakini komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Hal tersebut disebabkan komunikasi merupakan ruang kolektif kesepahaman dan kesamaan gerak yang menjadi penentu pencapaian tujuan bersama semua anggota. Oleh karena itu mendorong banyak studi mengenai komunikasi organisasi. Komunikasi di dalam organisasi dilihat sebagai jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lain dalam dimensi struktur dan kultur organisasi.

Praktik komunikasi dalam lingkup organisasi berfokus pada manusia-manusia sebagai subjek yang menjadi bagian tujuan organisasi. Selain itu, dalam organisasi komunikasi sebenarnya tidak hanya berbicara bentuk komunikasi yang berlangsung dalam organisasi, atau juga tak sekedar persoalan metode dan teknik yang

dipergunakan, atau terkait media yang dipilih dalam penyampaiannya. Dengan kata lain, komunikasi mengedepankan juga dimensi situasi atau konteks organisasi yang kemudian sangat menentukan respons atau jawaban lingkungan berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, pada saat komunikasi itu dilancarkan.

Dalam lingkup individu, komunikasi merupakan aktivitas pokok yang mulai dilakukan manusia dengan berbagai bentuk sejak manusia berada di dalam kandungan. Selanjutnya setelah manusia itu lahir ke dunia, segala aktivitas dalam kehidupan sekecil apapun tak lepas dari kerja-kerja komunikasi, terutama intrapersonal dan antarpersonal. Sebab komunikasi secara umum merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua pihak yang secara individu seringkali memiliki perbedaan harapan dan pandangan yang mencoba mencari kesamaan.

Dalam konteks masyarakat desa, disebutkan desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis

memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut menurut Permen No.113 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.(id.wikipedia.org).

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Maka pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kenyataannya desa merupakan satu aset yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang makin marak terlebih pemerintah mulai sadar bahwa pembangunan yang efektif dilakukan dari bawah, pemberdayaan bukan berarti perubahan, tetapi proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah hingga mampu meningkatkan taraf hidup. Menurut peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui maupun dihormati, maka desa jelas memiliki kewenangan dan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat desa beserta lembaga-lembaga desa.

Pemerintah desa sebagai figure utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dituntut untuk memiliki kemampuan, kredibilitas, dan akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah desa, pemerintah desa sebagai komunikator juga merupakan sumber daya manusia sehingga perlu ditingkatkan baik kemampuan profesional maupun pengisian informasi, sesuai tuntutan pemerintah desa dan beban kerja yang dihadapi. Kepala desa merupakan pemegang otoritas utama dalam pemerintahan desa, sehingga perlu memiliki kemampuan inovatif dan inisiatif dalam memimpin desa. Dengan demikian kesiapan desa tentulah sangat penting, desa haruslah memiliki kesiapan yang benar-benar matang dalam proses implementasi Undang-Undang Desa tersebut, Hal ini mengharuskan desa untuk mempersiapkan strategi-strategi komunikasi yang harus dipersiapkan untuk kemajuan pembangunan desa dan membawa modernisasi dalam menjalin relasi yang akan dilakukan oleh desa,

Berkaitan dengan strategi komunikasi dalam konteks komunikasi pembangunan, pihak pemerintah desa diibaratkan sebagai jantung yang mengatur dan melindungi hajat hidup masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Selain itu proses komunikasi pemerintahan diibaratkan “darah” yang harus dialirkan ke setiap lini organisasi sampai ke kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Komunikasi Pemerintah Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. Kalurahan Baturetno menghadapi tantangan masyarakat yang semakin kompleks di tengah keadaan kepadatan penduduk yang heterogen antara warga asli dengan pendatang. Kalurahan ini berdiri pada tahun 1946, merupakan penggabungan dari 3 Kalurahan Lama (Kalurahan sebelum kemerdekaan) yaitu: Kelurahan Mantup, Kelurahan Wiyoro, Kelurahan Ngipik. Kalurahan Baturetno menjadi pusat Kapanewon Banguntapan karena terletak di wilayah ini. Letak lokasi desa ini sangat

strategis karena tidak jauh dari kota dan dilalui Jalan Jogja-Wonosari Km 7 yang merupakan bagian dari Jalan Nasional Rute 3.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan msur di dalam organisasi pemerintahan Kalurahan Baturetno yang terdiri dari lurah, carik, jagabaya, danarto dan umum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terbuka. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dan dinarasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tanpa mengubah makna aslinya (Moleong, 2002:6).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kepemimpinan dalam Komunikasi Pemerintah Kalurahan Baturetno.**

Komunikasi dalam organisasi pemerintahan tidaklah mudah menciptakan

sistem kerja yang efektif. Kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi kepemimpinan. Melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, maka akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan efektif. Secara teoritis, sifat komunikasi dalam organisasi berlangsung dalam dua bentuk, formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual (Wiryanto, 2005).

Kepala desa (lurah) merupakan kepala unit dari unit yang merupakan

perangkat daerah pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat untuk menangani urusan ekonomi daerah dan tugas utama pemerintah. Bagaimana kepala Kepala Desa (lurah) melakukan komunikasi dengan bawahannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana pernyataan Lurah baturetno:

*kepala desa adalah leader. Ia mempunyai peran yang sangat besar dalam mengatur organisasi pemerintahan, bagaimana penyampaian komunikasi yang baik dalam mengkoordinir dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan program di kantor desa karena saya mempunyai kedudukan yang penting di pemerintahan desa”, demikian jelas kepala desa.*

Dari pernyataan kepala desa baturetno tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh kepala desa berusaha mendudukkan posisinya sebagai pemimpin yang mempunyai tugas

pokok dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.

Mengenai struktur pemerintahan , tersusun secara hirarkis dengan peran dan fungsi berbeda namun semua organ tersebut bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Masing-masing lini organisasi pemerintahan desa memiliki pola komunikasi agar semua bidang berjalan. Peran pemimpin, dalam hal ini kepala desa sangat besar dalam distribusi tugas melalui komunikasi vertikal kepada struktur di bawahnya. proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah.

Komunikasi terjadi saat pesan disampaikan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan. Dalam komunikasi juga terdapat unsur-unsur komunikasi yang harus dipenuhi. Adapun komponen komunikasi meliputi komunikator atau pengirim pesan, komunikan atau penerima pesan, media atau perantara, pesan atau informasi, efek

yang ditimbulkan serta umpan balik. Secara umum, komunikasi yang dilakukan oleh manusia berupa komunikasi lisan atau yang biasa disebut dengan komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal yang berupa bahasa tubuh, kode tulisan dan lain sebagainya. (Muhammad,2015; 1)

Conrad (dalam Tubbs dan Moss, 2005) mengidentifikasi tiga komunikasi organisasi sebagai berikut: fungsi perintah ; fungsi relasional ; fungsi manajemen ambigu.

- a) Fungsi perintah berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi antara sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut.
- b) Fungsi relasional berkenaan dengan komunikasi memperbolehkan anggota-anggota menciptakan dan

mempertahankan bisnis produktif hubungan personal dengan anggota organisasi lain. Hubungan dalam pekerjaan mempengaruhi kinerja pekerjaan (job performance) dalam berbagai cara. Misal: kepuasan kerja; aliran komunikasi ke bawah maupun ke atas dalam hirarki organisasional, dan tingkat pelaksanaan perintah. Pentingnya dalam hubungan antarpersonal yang baik lebih terasa dalam pekerjaan ketika anda merasa bahwa banyak hubungan yang perlu dilakukan tidak anda pilih, tetapi diharuskan oleh lingkungan organisasi, sehingga hubungan menjadi kurang stabil, lebih memicu konflik, kurang ditaati, dsb.

c) Fungsi manajemen ambigu berkenaan dengan pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Misal: motivasi berganda muncul karena pilihan yang diambil akan mempengaruhi rekan kerja dan

organisasi, demikian juga diri sendiri; tujuan organisasi tidak jelas dan konteks yang mengharuskan adanya pilihan tersebut adanya pilihan tersebut mungkin tidak jelas. Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan (ambiguity) yang melekat dalam organisasi. Anggota berbicara satu dengan lainnya untuk membangun lingkungan dan memahami situasi baru, yang membutuhkan perolehan informasi bersama.

Berkaitan komunikasi Lurah sebagai pemimpin wilayah, menurut Carik (sekretaris desa) *“Komunikasi Kepala Desa harus baik dalam mengatur dan mengkoordinir kegiatan Kelurahan sebab itu tanggung jawabnya sebagai pemimpin.”*

Dari pernyataan carik dapat menunjukkan bahwa komunikasi lurah harus mencerminkan nilai-nilai positif bagi



bawahan dalam menyelenggarakan organisasi. Sebagai komunikator, seorang pemimpin organisasi, manajer, atau administrator harus memilih salah satu berbagai metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan situasi pada waktu komunikasi dilancarkan. Sebagai komunikator, seorang manajer harus menyesuaikan penyampaian pesannya kepada peranannya yang sedang dilakukannya. Dalam hubungan ini, Henry Mintzberg seorang profesor manajemen pada McGill University di Montreal-Kanada, menyatakan wewenang formal seorang manajer menyebabkan timbulnya tiga peranan: peranan antarpersona; peranan informasi; dan peranan memutuskan. 1). Peranan antarpersona seorang manajer meliputi tiga hal: a).Peranan tokoh. Kedudukan sebagai kepala suatu unit organisasi, membuat seorang manajer melakukan tugas yang bersifat keupacaraan. Karena ia merupakan seorang tokoh, maka selain memimpin berbagai upacara di kantornya, ia juga

diundang oleh pihak luar untuk menghadiri berbagai upacara. Dalam peranan ini seorang manajer berkesempatan untuk memberikan penerangan, penjelasan, imbauan, ajakan, dll.b).Peranan pemimpin. Sebagai pemimpin, seorang manajer bertanggung jawab atas lancar-tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Beberapa kegiatan bersangkutan langsung dengan kepemimpinannya pada semua tahap manajemen: penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian. Ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak langsung berkaitan dengan kepemimpinannya, antara lain memotivasi para karyawan agar giat bekerja. Untuk melaksanakan kepemimpinannya secara efektif, maka ia harus mampu melaksanakan komunikasi secara efektif. Dalam konteks kepemimpinan, seorang manajer berkomunikasi efektif bila ia mampu membuat para karyawan melakukan kegiatan tertentu dengan kesadaran,

kegairahan, dan kegembiraan. Dengan suasana kerja seperti itu akan dapat diharapkan hasil yang memuaskan.c).Peranan penghubung. Dalam peranan sebagai penghubung, seorang manajer melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar jalur komando vertikal, baik secara formal maupun secara tidak formal.

2). Peranan informasi dalam organisasinya seorang manajer berfungsi sebagai pusat informasi. Ia mengembangkan pusat informasi bagi kepentingan organisasinya. Peranan informasional meliputi peranan-peranan sebagai berikut:a).Peranan memonitor. Dalam melakukan peranannya sebagai monitor, manajer memandang lingkungan sebagai sumber informasi. Ia mengajukan berbagai pertanyaan kepada rekan-rekannya atau kepada bawahannya, dan ia menerima informasi pula dari mereka tanpa diminta berkat kontak pribadinya yang selalu dibinanya.b).Peranan penyebar. Dalam peranannya sebagai penyebar ia

menerima dan menghimpun informasi dari luar yang penting artinya dan bermanfaat bagi organisasi, untuk kemudian disebar kepada bawahannya.c).Peranan juru bicara. Peranan ini memiliki kesamaan dengan peranan penghubung, yakni dalam hal mengkomunikasikan informasi kepada khalayak luar. Perbedaannya adalah dalam hal caranya: jika dalam peranannya sebagai penghubung ia menyampaikan informasi secara antarpribadi dan tidak selalu resmi, namun dalam perannya sebagai juru bicara tidak selamanya secara kontak pribadi, tetapi selalu resmi. Dalam peranannya sebagai juru bicara itu ia juga harus mengkomunikasikan informasi kepada orang-orang yang berpengaruh yang melakukan pengawasan terhadap organisasinya. Kepada khalayak di luar organisasinya ia memberikan informasi dalam rangka pengembangan organisasinya. Ia meyakinkan khalayak bahwa organisasi yang dipimpinnya telah melakukan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya. Ia meyakinkan pula

para pejabat pemerintah bahwa organisasinya berjalan sesuai dengan peraturan sebagaimana harusnya.

3). Peranan memutuskan seorang manajer memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pengambilan keputusan dalam organisasinya. Ada empat peranan yang dicakup pada peranan ini: a). Peranan wiraswasta. Seorang manajer berusaha memajukan organisasinya dan mengadakan penyesuaian terhadap perubahan kondisi lingkungannya. Ia senantiasa memandang ke depan untuk mendapatkan gagasan baru. Jika sebuah gagasan muncul, maka ia mengambil prakarsa untuk mengembangkan sebuah proyek yang iawasinya sendiri atau didelegasikannya kepada bawahannya. B). Peranan pengendali gangguan. Seorang manajer berusaha sebaik mungkin menanggapi setiap tekanan yang menimpa organisasi, seperti buruh mogok, para pelanggan menghilang, dsb. c). Peranan penentu sumber. Seorang manajer bertanggung jawab untuk memutuskan pekerjaan apa yang harus

dilakukan, siapa yang akan melaksanakan, dan bagaimana pembagian pekerjaan dilangsungkan. Manajer juga mempunyai kewenangan mengenai pengambilan keputusan penting sebelum implementasi dijalankan. Dengan kewenangan itu, manajer dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang berkaitan semuanya berjalan melalui pemikiran tunggal. d). Peranan perunding. Manajer melakukan peranan perunding bukan saja mengenai hal-hal yang resmi dan langsung berhubungan dengan organisasi, melainkan juga tentang hal-hal yang tidak resmi dan tidak langsung berkaitan dengan kekarayaan. Bagi manajer, perundingan merupakan gaya hidup karena hanya ialah yang mempunyai wewenang untuk menanggapi sumber-sumber organisasional pada waktu yang tepat, dan hanya ialah yang merupakan pusat jaringan informasi yang sangat diperlukan bagi perundingan yang penting.

Kaur Pemerintahan Desa Baturetno  
menuturkan *“Komunikasi Kepala*

*desa sangat berpengaruh dan menentukan terhadap kinerja staf di kantor desa baturetno sebab tanpa adanya komunikasi yang baik maka motivasi kerja pegawai akan menurun tentunya ini akan mempengaruhi pencapaian yang ingin diwujudkan.”*

Hubungan komunikasi antara atasan dengan pegawai di kantor sejauh ini berjalan dengan kondusif dan harmonis dalam menciptakan komunikasi yang intensif. Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing--masing pegawai. Begitu halnya dengan jalur sistem informasi, koordinasi dan komunikasi yang baik. Hal lain juga disampaikan kaur umum yang menjelaskan sebagai berikut :

*“Komunikasi sangat penting dalam satu organisasi soalnya sangat berkaitan dengan pekerjaan baik itu antara atasan dan bawahan, maupun antara sesama staf sehingga sangat diperlukan komunikasi yang baik.”*

Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan tentang komunikasi Lurah Baturetno selaku pemimpin organisasi pemerintahan kalurahan menunjukkan bahwa komunikasi yang dijalankan seorang pemimpin dalam hal ini lurah dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya berpengaruh terhadap kinerja bawahan, sehingga komunikasi yang dikirim sebagai pesan harus memiliki nilai kebaikan atau berkualitas sesuai dengan sifat komunikasi yaitu formal maupun non formal. Hal ini, dikarenakan kepala desa sebagai pemimpin unit organisasi memiliki peran yang sangat penting dan sangat menentukan komunikasi yang berupaya mengembangkan cara keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan kepada semua staf, bersikap bijak mau menerima masukan atau pendapat dari staf maupun orang lain, mau bekerja sama dan tidak boleh mementingkan diri sendiri.

**Pola Komunikasi Organisasi Pemerintah  
Kalurahan Baturetno,**

Komunikasi organisasi bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari pada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan komunikasi diadik, komunikasi antar-pribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, dan komunikasi luar organisasi. Komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan merupakan usaha dalam berinteraksi dengan pegawai agar koordinasi serta tugas-tugas yang diberikan dari pimpinan dapat tersampaikan dan dijalankan dengan baik.

Pola komunikasi dari atas ke bawah disebut pola vertikal. Implikasinya, pesan yang diberikan dari atasan organisasi merupakan instruksi kepada bawahan. Sifat aliran pesannya dapat dalam bentuk formal

maupun informal. Masing-masing memiliki implikasi. Pada bentuk formal, pesan dari atasan ke bawahan adalah penanda ketegasan yang harus ditindaklanjuti dengan cepat. Sementara bersifat informal adalah pesan-pesan yang menguatkan proses kegiatan yang diperintahkan tadi pada tataran implementasi. Sehingga bawahan menjadi tidak kaku dan terbebani dengan perintah tadi.

Berdasarkan hasil penelitian, pola komunikasi yang dilakukan oleh Lurah Baturetno tidak hanya dalam memberi instruksi dan perintah tapi juga mengklarifikasi sejumlah persoalan pada rapat-rapat rutin dan evaluasi. Selain itu peneliti juga menemukan himbauan tertulis yang ditempel di papan informasi kantor pemerintah desa sehingga diketahui oleh perangkat desa bahkan khalayak luas secara terbuka.

Proses komunikasi dalam organisasi yang terjalin dari pegawai kepada kepala Desa (Lurah) sangat penting

dalam kelancaran kerja pegawai, Walaupun para pegawai dalam berinteraksi dengan kepala (Lurah) dibatasi dengan skala kepentingan keperluan pegawai. Pegawai juga tidak dapat langsung bertemu dengan kepala Desa (Lurah) apabila persoalan pegawai dapat diselesaikan bersama kepala bidang pegawai tersebut. Proses interaksi antara pegawai dengan kepala Desa (Lurah) pun hanya sering terjadi ketika hendak melaporkan informasi-informasi rutin yang diantaranya meliputi laporan harian, bulanan, dan tahunan serta melaporkan secara langsung tugas yang telah diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Budiono S.IP sebagai Kaur Umum(Tata Laksana) mengatakan bahwa para kaur tidak sulit berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Desa maupun sesama staf yang memiliki fungsi berbeda lintas bidang.

*"Pegawai disini ketika berkomunikasi dengan kepala desa hanya terkait dengan*

*tugas biasanya cuma melaporkan hasil kerja atau laporan kepada kepala desa secara langsung di dalam ruangnya"* papar kaur umum.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepala desa (lurah) tidak terlepas dari komunikasi karena komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh atau mempengaruhi satu dengan yang lain keberlangsungan komunikasi yang efektif didalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran seorang pemimpin dan komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Menurut Sekretaris Desa (carik) pola komunikasi yang sering dilakukan dalam bentuk komunikasi timbal balik.

*"Di kantor ini komunikasi yang sering kami pakai adalah komunikasi timbal - balik karena ini fungsinya member pemahaman bagi pegawai yang bertanya dan memberikan penjelasan bagi pegawai yang belum mengerti dengan tugas yang di berikan. Tanpa komunikasi timbal – balik*

*saya rasa akan sering terjadi miskomunikasi dan dampaknya adalah tujuan yang ingin dicapai tidak akan terwujud.”*

Ditambahkan juga oleh kaur keuangan (Kaur Danarta) Komunikasi bisa terjadi kapan saja juga terjadi kepada siapa saja baik kepala desa, Sekretaris, kepala bidang maupun staf karena komunikasi pasti memiliki timbal balik dari komunikator dan komunikan.

*“Memang ada hal – hal yang memang kita tanyakan jika kita memang merasa kurang jelas dan sejauh ini Kepala desa juga menjelaskan dengan baik apa yang belum kita pahami, dengan maksud agar kita bisa mengerjakan tugas dan pekerjaan kita dengan baik dan benar”,* imbuh kaur keuangan.

Hal lain juga disampaikan oleh Kaur Pemerintahan :

*“Komunikasi yang terjalin di kantor desa ini cukup baik dan tidak ada masalah karena dikembangkan prinsip keterbukaan,*

*kekeluargaan dan kebersamaan, bentuk komunikasi yang sering terjadi yaitu bentuk komunikasi timbal balik antar personal, disposisi surat – surat dan komunikasi secara langsung dengan seluruh staf”,* lanjut kaur pemerintahan.

Dari beberapa pernyataan terlihat peran penting komunikasi dalam menunjang kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi di pemerintahan Kalurahan Baturetno yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan yang mengedepankan keterbukaan antara satu sama lain. Hubungan komunikasi antara pegawai di kantor Kalurahan Baturetno sudah berjalan dengan intensif. Dengan istilah lain, komunikasi antara pegawai berjalan dengan baik karena masing-masing lini organisasi selalu memilih pola transparansi atau keterbukaan dalam menjalankan tanggung jawab atau tupoksi yang diemban, baik itu yang berhubungan dengan informasi, komunikasi maupun koordinasi dalam

menjalankan tupoksi masing-masing pegawai.

### **Hambatan Komunikasi Organisasi Pemerintah Kalurahan Baturetno**

Dalam suatu organisasi atau lembaga terdapat orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi khususnya organisasi suatu kantor tentu memerlukan berbagai informasi, memiliki tujuan, memiliki struktur, memenuhi kebutuhan kinerja, mengembangkan tugas dan tanggung jawab, serta dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan. Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang maksimal dalam suatu organisasi maka perlu ada komunikasi diantara mereka yang disebut komunikasi organisasi.

Salah satu upaya penting dari proses komunikasi organisasi adalah perlu menciptakan sistem pelayanan yang baik. Namun tak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan komunikasi organisasi dipengaruhi oleh faktor pendukung dan

penghambat baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut. Berikut hambatan komunikasi yang dialami di Kantor Kalurahan Baturetno. Pertama, disiplin dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Pelayanan yang maksimal merupakan target yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi. Dalam komunikasi organisasi seringkali ditemukan berbagai macam persoalan dimana lambatnya proses kerja, ketidak telitian, melaksanakan pekerjaan kurang tepat waktu, kurang mematuhi perintah atasan. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan sebagian pegawai di kantor tersebut.

Dalam komunikasi organisasi disiplin merupakan sebuah kebijakan yang harus dijalankan oleh petugas pelayanan. Lemahnya penerapan disiplin bagi petugas pelayanan dapat dilihat antara lain: berbagai pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, pulang kantor lebih cepat/ belum waktunya, masih rendahnya rasa pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab



terhadap tugas-tugas pelayanan; pemberian pelayanan kepada masyarakat masih belum maksimal; serta berbagai pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem online. Komunikasi organisasi bertujuan untuk membentuk arus informasi, pertukaran informasi dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi juga terjadi dalam suatu sistem dan mekanisme pelayanan yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Pihak eksternal Kantor Kalurahan Baturetno adalah masyarakat yang memiliki ketidakmampuan dalam hal internet. Mereka tidak tahu melakukan registrasi melalui sistem *online*, bahkan mereka tidak tahu jika informasi pelayanan juga dapat dibaca melalui informasi di dunia maya. Masyarakat tidak dapat dipungkiri, tidak semua memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan komputer dan memanfaatkan internet khususnya dalam

pemanfaatan pelayanan pada kantor desa. Hal ini menjadi salah satu penghambat cepatnya layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat di Kalurahan Baturetno.

### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut :

Komunikasi organisasi sangat penting dalam melancarkan keberhasilan pekerjaan pemerintah Baturetno, baik melalui pola komunikasi formal vertikal antara atasan dan bawahan, atau sebaliknya, maupun pola komunikasi antar bagian atau horizontal. Efektivitas komunikasi organisasi di Pemerintahan Kalurahan Baturetno ditentukan oleh keterbukaan, sumber daya manusia, komunikasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh anggota organisasi, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.

Pola komunikasi organisasi di Kalurahan Baturetno adalah pola

komunikasi dua arah yang dikatakan timbal balik menjadi factor penting dalam pencapaian tujuan organisasi Pemerintahan Kalurahan Banturetno, Namun demikian masih ada faktor penghambat dalam proses komunikasi organisasi Pemerintah Desa Banturetno adalah disiplin dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem online.

Pola komunikasi yang telah dibangun pemerintah Kalurahan Banturetno semakin efektif dalam menggerakkan pembangunan desa, maka Lurah sebagai pemimpin unit organisasi memiliki strategi dalam menjalankan perannya. Untuk itu upaya yang sangat diperlukan adalah mengembangkan cara keterbukaan, kebersamaan dan kekeluargaan kepada semua staf, bersikap bijak mau menerima masukan atau pendapat dari staf maupun orang lain, mau bekerja sama dan tidak mementingkan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad. Arni. 2015. Komunikasi Organisasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moleong.Lexy J. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moleong.Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat.Jalaludin. 1990. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge 2018, Perilaku Organisasi, Buku Satu, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tubbs, Stewart L. – Moss, Sylvia, Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 170.

Wiryanto, 2005, Pengantar Ilmu  
Komunikasi, Jakarta: Gramedia  
Widiasarana Indonesia.

Sumber – Sumber lain :

Definisi Desa. Wikipedia. Indonesia. 31  
Januari 2014.(Dikutip 20 Januari  
2020). Tersedia dari :  
[Http://id.wikipedia.Org/wiki/Desa](http://id.wikipedia.Org/wiki/Desa).

Indrizal, Edi. (t.t.). Memahami Konsep  
Perdesaan Dan Tipologi Desa.  
[Online]. Diakses dari:  
[http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/  
EdiIndrizal/M3.pdf](http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf)

Ivanovich Agusta. 2014. Tilikan tentang  
UU Desa. Kompas, 25 Januari 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia. No 6  
Tahun 2014 Tentang Desa. 15 Januari  
2014.Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 No 5495.  
Jakarta.